

Pengukuran Kinerja triwulan 1 s.d 4 Tahun 2025

Tujuan	Indikator Tujuan (IKU KOTA)	Sasaran	Indikator Sasaran (IKD KOTA)	Urusan	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja s.d Semester I	Pagu Induk APBD	Pagu P. APBD	Realisasi Anggaran	Keterangan
Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Melalui Optimalisasi Potensi Unggulan Daerah	Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan Daerah	PDRB Sektor Perindustrian	Urusan Perindustrian	1. Persentase Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri	%	50M	37,5M	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase peningkatan Pelatihan dan produktifitas tenaga kerja	%	89,3	90,3	3.571.854.200,00	4.363.272.673	3.870.636.473,00	
		Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan Daerah		Urusan Tenaga Kerja	2. Persentase Pencari kerja yang ditempatkan pada sektor Formal dan Informal	%	90%	83%	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase sertifikat pelatihan yang diterbitkan sesuai dengan kompetensinya	%	89,3	90,3	3.571.854.200,00	4.363.272.673	3.870.636.473	
		Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan Daerah							Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah peserta pelatihan berbagai jenis kejuruan dan kewirausahaan yang dilaksanakan	orang	624	656	3.400.296.200,00	4.208.863.001	3.713.031.824,00	
									Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesiapan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	kali	12	12	171.558.000,00	174.409.671,50	157.604.649,00	
		Meningkatnya Manajemen PerkantoranMeningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan Daerah		Urusan Penunjang Pemerintahan					PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase penempatan tenaga kerja Produktivitas pada Tahun n	%	90	185	175.484.630,00		203.916.014,00	
									Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang terlayani pada pelayanan antar kerja	orang	800	2115	135.484.630,00	133.243.544,00	159.096.818,00	
									Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	orang	50	50	38.332.630,00	34.447.630,00	29.279.050,00	
									Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	orang	20	39	97.152.000,00	98.795.914,00	135.422.614,00	
									Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase penempatan tenaga kerja melalui job fair	%	80	192,4284444	40.000.000,00	33.750.000,00	39.214.350,00	
									Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui Job Fair/Bursa Kerja	%	130	266	40.000.000,00	33.750.000,00	39.214.350,00	
					3. Persentase perusahaan yang memenuhi persyaratan kerja	%	72%	72%	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang memenuhi persyaratan kerja	%	70	99,18	2.379.046.600,00	2.416.665.514,00	2.546.077.500,00	
					Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial	%	52%	57%	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang mendapatkan fasilitas pemenuhan persyaratan kerja	%	100	199,67	2.266.631.500,00	2.313.999.000,00	2.332.703.380,00	
									Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah perusahaan yang difasilitasi pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan	perusahaan	100	325,00	2.266.631.500,00	2.313.999.000,00	2.332.703.380,00	
					Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota				Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial	%	79	187,23	112.415.100,00	102.666.514,00	213.374.120,00	
									Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	perkara	12	23,00	112.415.100,00	102.666.514,00	213.374.120,00	
					4.Persentase Capaian Pengelolaan Administrasi Perkantoran yang difangani sesuai ketentuan	%	76,69	76,91	URUSAN PERINDUSTRIAN								
									PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	%	100	90,44147472	8.949.879.142,00		7.924.430.226,00	
									Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		%	100	96,37831388	56.789.000,00	42.807.682,00	0,00	
									Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan	dokumen	10	12	32.144.000,00	33.150.082,00		
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan	laporan	10	12	24.645.000,00	9.657.500,00		
									Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	%	100	67,99800135	7.922.042.887,00	7.818.441.240,00	7.129.533.970,00	
									Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase realisasi gaji dan tunjangan ASN yang tepat waktu	Orang	61	218	7.796.505.887,00	7.696.196.240,00	7.028.617.970,00	
									Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase dokumen penatausahaan keuangan yang terverifikasi	dokumen	12	12	116.642.000,00	116.272.000,00	94.973.000,00	
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	laporan	12	12	8.895.000,00	5.973.000,00	5.943.000,00	
									Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	%	100	66,84	6.250.000,00	2.805.000,00	1.875.000,00	
									Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah yang disusun sesuai ketentuan	laporan	12	12	6.250.000,00	2.805.000,00	1.875.000,00	
									Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	%	100	95,21	4.050.000,00	12.000.000,00	11.425.000,00	
									Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Move dan Penilaian Kinerja yang dilaksanakan	dokumen	12	12	4.050.000,00	12.000.000,00	11.425.000,00	

									Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	%	100	85	238.975.895,00	185.149.116,00	172.292.694,00		
									Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	12	12	28.476.500,00	37.912.350,00	37.538.138,00		
									Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Laporan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	laporan	12	12	6.272.500,00	7.695.250,00	5.575.088,00		
									Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	laporan	12	12	3.120.000,00	3.120.000,00	3.120.000,00		
									Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	laporan	12	12	7.000.000,00	6.300.000,00	6.267.380,00		
									Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	12	164.728.895,00	101.156.516,00	93.615.772,00		
									Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	laporan	12	12	4.150.000,00	3.735.000,00	3.599.996,00		
									Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Laporan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	laporan	12	12	25.230.000,00	25.230.000,00	22.576.320,00		
									Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi	%	100	93,74	74.500.000,00	176.750.000,00	165.686.361,00		
									Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	laporan	3	3	74.500.000,00	176.750.000,00	165.686.361,00		
									Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Ketatalaksanaan yang Terpenuhi	%	100	97	407.223.760,00	423.680.533,00	405.630.095,00		
									Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	12	126.990.000,00	126.990.000,00	111.147.687,00		
									Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	12	280.233.760,00	296.690.533,00	294.482.408,00		
									Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	%	100	97	240.047.600,00	338.163.529,00	312.816.157,00		
									Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Laporan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya serta bbn	laporan	12	12	88.437.600,00	82.814.529,00	60.428.902,00		
									Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	laporan	12	12	24.000.000,00	24.000.000,00	21.840.000,00		
									Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Pemeliharaan/Rehab Gedung Kantor yang dipelihara	unit	2	2	127.610.000,00	231.349.000,00	230.547.255,00		
							%	83,5	83,5	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Kebutuhan perencanaan dan evaluasi pembangunan industri yang difasilitasi	%	84	166,50	235.133.937,00	369.849.834,00	355.619.659,00	
							%	83,5	83,5	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah RPIK dan RAPERDA	%	84	166,50	235.133.937,00	369.849.834,00	355.619.659,00	
							dokumen	4	4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah pelaku industri yang meningkat ketrampilannya	dokumen	4	104	40.112.850,00	36.928.764,00	36.679.506,00	
							dokumen	8	8	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah pelaku industri yang mendapatkan fasilitas standarisasi industri	dokumen	8	53	176.499.309,00	306.496.070,00	299.870.153,00	
							dokumen	2	2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah pelaku industri yang mendapatkan pembinaan pengembangan usaha	dokumen	2	32	16.871.778,00	24.775.000,00	17.450.000,00	
							dokumen	1	1	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah laporan capaian kinerja industri yang disusun sesuai ketentuan	dokumen	1	2	1.650.000,00	1.650.000,00	1.620.000,00	
							%	82,5	82,5	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase ijin usaha industri yang difasilitasi	%	83	164,50	15.828.097,00	13.490.097,00	13.132.500,00	
							%	82,5	82,5	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan	Persentase industri yang mematuhi ijin usaha industri	%	83	164,50	15.828.097,00	13.490.097,00	13.132.500,00	
							dokumen	10	9	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Usaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pemeriksaan lapangan atas ijin usaha industri (IUI) yang diajukan	dokumen	10	9	15.828.097,00	13.490.097,00	13.132.500,00	
							%	82,5	82,5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Data Industri yang dikelola dengan SINAS (Sistem Informasi Industri Nasional)	%	83	164,50	22.269.830,00	9.814.900,00	8.965.620,00	
							%	82,5	82,5	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pelaku industri yang menyampaikan laporan data industri	%	83	164,50	22.269.830,00	9.814.900,00	8.965.620,00	
							dokumen	4	4	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIBINAS)	Persentase pelaku industri yang memenuhi kewajiban pelaporan industri	dokumen	4	9	22.269.830,00	9.814.900,00	8.965.620,00	